

TATA KELOLA TAMAN HUTAN KELONO SEWANDONO KABUPATEN PONOROGO

THE GOVERNANCE OF KELONO SEWANDONO FOREST PARK IN PONOROGO REGENCY

¹Amor Surojo, ²Yusuf Adam Hilman

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur Indonesia
Email: amorsurojo@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur Indonesia

Diterima: 19 Oktober 2024; Direvisi: 21 November 2024; Disetujui: 22 November 2024

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the governance of Kelono Sewandono Forest Park in Ponorogo Regency using the theory of Good Environmental Governance. According to this theory, effective environmental management involves the participation of all stakeholders, including the government, NGOs, the private sector, and civil society, to achieve environmental sustainability. The research methodology employed a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The study involved six informants as the sample, selected through purposive sampling. The informants included the Head of the Waste and Parks Management Division, the Head Foreman of Kelono Sewandono Forest Park, and members of the community who use the park's facilities, deemed qualified and knowledgeable in park management. The findings indicate that the park's management has adhered to existing regulatory principles; however, challenges such as budget constraints and vandalism persist. Efforts to enhance public understanding of park regulations and active participation from various stakeholders, including CSR involvement from the private sector, are expected to improve the effectiveness of park management. A systematic and collaborative approach between the government and the community is essential to create a clean, safe, and sustainable park.

Keywords: Governance, Forest Park, Good Environmental Governance, Environmental Sustainability, Community Participation, CSR, Ponorogo Regency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori *Good Environmental Governance*. Berdasarkan teori ini, pengelolaan lingkungan yang baik melibatkan peran semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan enam informan sebagai sampel, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Para informan terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Kepala Mandor Taman Kelono Sewandono, serta masyarakat pengguna fasilitas taman, yang dianggap memiliki kualifikasi dan pengetahuan relevan dalam pengelolaan taman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman telah mengikuti prinsip-prinsip peraturan yang ada, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan vandalisme. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang aturan taman serta partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk pelibatan CSR dari sektor

swasta, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan taman. Pendekatan sistematis dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan taman yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola, Taman Hutan, *Good Environmental Governance*, Keberlanjutan Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, *Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2023 memiliki penduduk mencapai 975,86 ribu jiwa, meningkat dari 855.281 ribu jiwa pada tahun 2010 (BPS Kabupaten Ponorogo, 2023). Peningkatan populasi ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk kebutuhan yang meningkat akan ruang publik seperti taman kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Namun, gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung konsumtif dan apatis terhadap lingkungan memperburuk masalah ini (Hilman, 2018). Taman kota, sebagai bagian dari RTH, memiliki fungsi ekologis, estetis, dan sosial. Sayangnya, pembangunan taman seringkali lebih menekankan aspek dekoratif daripada manfaat multifungsi yang lebih luas, seperti hortikultura (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2015). Dalam konteks Kabupaten Ponorogo, luas RTH saat ini hanya sekitar 10% dari target 20% yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Cahyani et al., 2023). Pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan RTH sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, yang mewajibkan 30% dari wilayah perkotaan dialokasikan untuk RTH, baik publik maupun privat. Namun, implementasi kebijakan ini belum optimal di Ponorogo, dengan banyaknya RTH yang tidak dikelola secara maksimal dan ketergantungan pada visi misi Bupati yang sedang menjabat (Wiratama et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo, dengan pendekatan teori *Good Environmental Governance*. Penelitian ini akan mengkaji peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan taman untuk mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori *Good Environmental Governance* sebagai landasan utama dalam mengkaji tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan LSM dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks *Good Environmental Governance*, pengelolaan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas manajemen yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga mempertimbangkan nilai intrinsik lingkungan itu sendiri (Musdalifah, 2019).

Tata kelola lingkungan adalah pendekatan alternatif yang lebih inklusif dibandingkan manajemen tradisional, yang cenderung hanya memperhitungkan efisiensi dan efektivitas. Tata kelola ini memperluas peran berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Tata kelola lingkungan yang baik melibatkan semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep "*good environmental governance*" yang menyatakan bahwa negara dan masyarakat memiliki peran sentral dalam pelestarian lingkungan (Nur & Husen, 2022).

Pendekatan tata kelola yang baik mencakup empat elemen kunci: kesadaran, pemberdayaan, koordinasi, dan penegakan hukum (Nafi'ah, 2015). Kesadaran mengacu pada pentingnya memberikan informasi dan meningkatkan keterbukaan sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Pemberdayaan berarti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa mereka memiliki hak akses

terhadap sumber daya alam. Koordinasi menekankan perlunya kerjasama antara semua pihak untuk mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan, sementara penegakan hukum menitikberatkan pada pentingnya sanksi yang tepat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Penelitian sejenis yang relevan menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi dan pemberdayaan masyarakat. Hilman (2018) menemukan bahwa pembangunan taman kota di beberapa wilayah seringkali hanya bersifat dekoratif, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan interaksi sosial yang lebih luas. Di Kabupaten Ponorogo, Cahyani et al. (2023) menunjukkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya mencapai 10% dari target yang ditetapkan, mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan masih menghadapi banyak kendala.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Taman Hutan Kelono Sewandono sebagai salah satu bentuk tata kelola lingkungan di Ponorogo, dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini menitikberatkan pada satu taman hutan yang dikelola sebagai model tata kelola lingkungan berbasis *Good Environmental Governance*, yang berpotensi menawarkan solusi bagi pengelolaan RTH di wilayah lain.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sejalan dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu yang diteliti. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam dengan mengumpulkan data dalam lingkungan partisipatif, melakukan analisis induktif, dan menyusun interpretasi peneliti mengenai makna yang diperoleh dari data.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, dengan fokus pada tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi informan yang terlibat dalam pengelolaan taman hutan tersebut, sehingga memberikan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian mencakup lembaga pemerintah dan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yang secara sengaja memilih individu dengan pengetahuan dan pengalaman relevan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data melibatkan tiga metode utama:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas di lapangan, mencatat kejadian atau fenomena yang relevan secara sistematis.
2. Wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti berinteraksi dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi detail terkait pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono.
3. Dokumentasi berupa pengumpulan dokumen yang mendukung data lapangan, seperti kebijakan, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahapan:

1. *Data Condensation*, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.
2. *Data Display*, yaitu penyajian data dalam format yang mudah dipahami agar peneliti dapat melihat pola dan hubungan antarvariabel.
3. *Conclusion Drawing*, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dan ditampilkan, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat diverifikasi.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yang melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas informasi. Triangulasi data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka membahas isu-isu yang relevan dengan penelitian ini, wawancara telah dilakukan dengan para informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban serta tanggapan terkait masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono Kabupaten Ponorogo. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut mencakup:

1. Awareness (Kesadaran/Kepedulian)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo masih perlu ditingkatkan. Meskipun implementasi penataan ruang mengikuti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012, tantangan dalam menjaga RTH masih ada, terutama keterbatasan anggaran. Pemeliharaan taman, baik fisik maupun tanaman, sangat penting untuk memastikan fungsi taman tetap optimal. Sosialisasi melalui pemasangan rambu-rambu telah dilakukan, tetapi tindakan vandalisme menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat.

2. Empowerment (Pemberdayaan)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan taman sangat diharapkan, terutama dalam melibatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemeliharaan taman. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo berupaya melibatkan masyarakat, termasuk pedagang dan juru parkir, dalam menjaga kebersihan taman. Meskipun ada upaya untuk memberdayakan masyarakat, masih terdapat kendala dalam akses informasi dan komunikasi, sehingga edukasi mengenai pentingnya menjaga taman perlu diperkuat.

3. Coordination (Koordinasi)

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sangat penting dalam pengelolaan taman. Namun, masyarakat merasa bahwa alur informasi dan komunikasi yang ada kurang jelas. Usulan penambahan kotak saran dan peningkatan penyebaran informasi melalui media sosial menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman.

4. Enforcement (Kepatuhan)

Kepatuhan terhadap aturan di taman menunjukkan beberapa tantangan. Meskipun telah dibentuk satuan tugas (satgas) keamanan, keberadaan petugas sering kali tidak terlihat dan tidak memberikan pengawasan yang memadai. Masyarakat mengusulkan peningkatan informasi mengenai keberadaan petugas keamanan dan pentingnya melibatkan mereka dalam penegakan aturan. Tindakan reaktif dan preventif perlu diterapkan untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan taman dan menegur pelanggar secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori *good environmental governance* menurut *Asia Pacific*

Forum for Environmental and Development (APFED) tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam pengelolaan taman, masih ada kendala yang perlu ditangani lebih lanjut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan taman dan edukasi lingkungan diakui sebagai faktor kunci untuk keberlanjutan taman. Namun, tindakan vandalisme yang sering terjadi menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih efektif. Pemberdayaan masyarakat juga berperan penting, dengan melibatkan komunitas lokal dan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menjaga kebersihan taman.

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) dinilai cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan taman melalui fasilitas seperti kotak saran dan media sosial. Dalam aspek kepatuhan, keberadaan petugas keamanan yang juga berfungsi sebagai petugas kebersihan adalah langkah positif, tetapi sosialisasi mengenai peran mereka perlu ditingkatkan untuk efektivitas pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan komunikasi antara pihak pengelola taman dan masyarakat, serta implementasi strategi pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, Taman Hutan Kelono Sewandono dapat berfungsi sebagai ruang hijau publik yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini, sehingga akhirnya penelitian dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Ponorogo. (2023). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. BPS Kabupaten Ponorogo.<https://ponorogokab.beta.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/e6faf6f3a1edb57dba79cdc8/kabupaten-ponorogo-dalam-angka-2023.html>
- Cahyani, Y. T., Santoso, L., & Ma'mun, S. (2023). Budgeting From an Islamic Green Economy Perspective in Local Development. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 3(2), 236–263. <https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.7542>
- Creswell. John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (4th ed., Vol. 4).
- Direktorat Jenderal Hortikultura. (2015). *Hortipark (Taman Hortikultura)*. <https://hortikultura.pertanian.go.id/343/>
- Hilman, Y. A. (2018). Efektivitas Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Taman Kota di Kabupaten Ponorogo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 155–172. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/96>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed., Vol. 3). SAGE Publications Inc. <https://pdfroom.com/books/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook/9qlgyX3PdMG/download>
- Musdalifah, D. (2019). *Law Enforcement Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepada Pelaku Usaha Laundry Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Environmental Governance* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/89833/>
- Nafi'ah, B. A. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 218–228. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp54bdaa8313full.pdf>
- Nur, M. S., & Husen, A. (2022). Penerapan Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35–49. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jgg/article/view/25110>

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032, Pub. L. No. 1, 1 (2012). https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/345/Salinan_PERDA_No_1_Tahun_2012.PDF

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26, 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>

Wiratama, Y. H., Sobari, W., & Mashuri, A. (2023). Penerapan Tata Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(2), 149–166. <https://bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/view/118>